

**TINDAKAN MEMPEKERJAKAN DAN MENAWARKAN PEMANDU
KARAOKE UNTUK TUJUAN PROSTITUSI OLEH KTV H1 DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Nama : Johanes Cahyono
Jurusan / Program Studi: Hukum / Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Korporasi memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, namun tidak sedikit korporasi yang justru melakukan tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang dan menyediakan jasa layanan seksual merupakan beberapa bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh korporasi, khususnya yang bergerak pada bidang usaha karaoke. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan mempekerjakan dan menawarkan pemandu karaoke untuk tujuan prostitusi oleh korporasi yang bergerak pada bidang usaha karaoke telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Oleh karena itu, terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 40 ayat (7) jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata kunci: *Kejahatan Korporasi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pornografi*

**THE ACT OF HIRING AND OFFERING KARAOKE GUIDES FOR THE
PROSTITUTIONAL PURPOSE BY KTV H1 REVIEWED UNDER LAW
NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF THE
HUMAN TRAFFICKING CRIME AND LAW NUMBER 44 OF 2008
CONCERNING PORNOGRAPHY**

Name : Johanes Cahyono
Dicipline/Study Programme: Law / Legal Studies
Contributor : Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Corporations have an important role in national development, but significant number of corporations are involved in criminal offences. Human trafficking and illegal sexual works are among several forms of crime conducted by corporations, specifically those works in *karaoke* business. This study aimed to find out the forms of criminal sentence that can be imposed on business that employs and offers *karaoke* hosts for prostitutions. The method used in this study is normative juridical method, which is law research designed to solve legal issues by examining law norms, law principles, as well as legal doctrines that are relevant to the research topic. This study employed two approaches, namely statute approach and conceptual approach. The result of this study shows that the act of employing and offering *karaoke* hosts for prostitutions by karaoke business violates Article 2 Section (1) Law Number 21 Year 2007 about Eradication Human Trafficking Crime and Article 4 Section (2c) and (2d) Law Number 44 Year 2008 about Pornography. Thus, corporations that conduct those offenses can be subjected to criminal penalties in accordance Article 15 Law Number 21 Year 2007 about Eradication Human Trafficking Crime as well as Article 40 Section (4) and Article 41 Law Number 44 Year 2008 about Pornography.

Keyword: corporate crime, human trafficking crime, pornography crime